



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR ~~3A~~ TAHUN 2023  
T E N T A N G  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota.
8. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman.
12. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
13. Perjanjian Kinerja Tahunan adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
15. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
16. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.



## Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## Pasal 3

Ruang lingkup IKU Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
- e. pengukuran kinerja;
- f. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

## Pasal 5

Penetapan IKU mengacu :

- a. untuk pemerintah kota pada Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- b. untuk perangkat daerah pada Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

## Pasal 6

IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. IKU Pemerintah Kota paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
- b. IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

## Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini :

- a. badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman dan Bagian Organisasi & Aparatur Setda Kota Pariaman diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Inspektorat Kota Pariaman melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

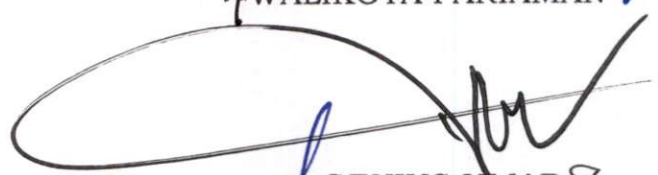
## Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

  
YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 34

PARAF KOGESKIP PRODUK HURUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	
SEKDAKO PARIAMAN	21/9/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PENERJANTERAPAN (ASISTEN)	20/03/23
KABAG HURUM	13/7-23
PERMINTA	23/7-23



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Lampiran I Peraturan Walikota Pariaman

Nomor :  
Tanggal :

3<sup>34</sup> Juli

Tahun 2023  
2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab								
2	4	5	6	7	8								
<b>Tujuan 1 :</b>													
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak	<p>Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung dengan rumus :</p> $IPM = \sqrt[8]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran} \times 100}$ <p>Dimana : IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu :</p> <table border="1"> <tr> <td>IPM</td> <td>: Indeks Pembangunan Manusia</td> </tr> <tr> <td>Indeks Kesehatan</td> <td>: Diambil dari Angka Harapan Hidup</td> </tr> <tr> <td>Indeks Pendidikan</td> <td>: Diambil dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah</td> </tr> <tr> <td>Indeks Pengeluaran</td> <td>: Diambil dari PDB Perkapita</td> </tr> </table>	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Kesehatan	: Diambil dari Angka Harapan Hidup	Indeks Pendidikan	: Diambil dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	Indeks Pengeluaran	: Diambil dari PDB Perkapita	BPS	<p>OPD Penanggung Jawab Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Kesehatan</li> <li>2 Dinas Pendidikan Pemuda &amp; Olahraga</li> <li>3 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM</li> <li>4 Dinas Pertanian, Pangan &amp; Perikanan</li> <li>5 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja</li> <li>6 Dinas Pariwisata &amp; Kebudayaan</li> </ol> <p>OPD Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>2 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah</li> <li>3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan</li> <li>4 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH</li> <li>5 Desa dan Kelurahan se Kota Pariaman</li> </ol>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia												
Indeks Kesehatan	: Diambil dari Angka Harapan Hidup												
Indeks Pendidikan	: Diambil dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah												
Indeks Pengeluaran	: Diambil dari PDB Perkapita												
<b>Sasaran 1.1 :</b>													
Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Angka harapan lama sekolah adalah : sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	<p>Angka Harapan Lama Sekolah dapat dihitung dengan rumus :</p> $EYS'_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$ <p>Angka Harapan Lama Sekolah =</p> <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>EYS'_a</math> : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;</li> <li><math>E'_i</math> : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;</li> <li><math>P'_i</math> : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;</li> <li>i : Usia (a, a+1, ..., n) ;</li> <li>FK : Faktor koreksi.</li> </ul>	BPS	<p>OPD Penanggung Jawab Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Pendidikan Pemuda &amp; Olahraga</li> </ol> <p>OPD Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>2 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah</li> <li>3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan</li> <li>4 Dinas Kesehatan</li> <li>5 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ol>								
	2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka rata-rata lama sekolah adalah : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	<p>Angka Rata-Rata Lama Sekolah dapat dihitung dengan rumus :</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke - i})$ <p>Angka rata-rata lama =</p> <p>dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>P_{15+}</math> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</li> <li>Lama sekolah penduduk ke-i = <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1</li> <li>d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ul> </li> </ul>	BPS	<p>OPD Penanggung Jawab Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Pendidikan Pemuda &amp; Olahraga</li> </ol> <p>OPD Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>2 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah</li> <li>3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan</li> <li>4 Dinas Kesehatan</li> <li>5 Dinas PMPTSP &amp; Naker</li> </ol>								



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
2	4	5	6	7	8
<b>Sasaran 1.2 :</b>					
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Angka usia harapan hidup adalah Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) dapat dihitung dengan rumus : Angka harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun. UHH di hitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan UHH yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). Umur Harapan Hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi dan lingkungannya yang baik	BPS	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Kesehatan <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH 3 Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga 4 Kecamatan
	2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dapat dihitung dengan rumus :  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <math display="block">\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah Balita Pendek}}{\text{Jumlah semua balita dalam wilayah tertentu dan kurun waktu tertentu}} \times 100\%</math> </div>	EPPBGM Kemenkes	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Kesehatan 2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Sosial 2 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup 3 Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan 4 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga 5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
<b>Sasaran 1.3 :</b>					
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	1. Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	Pengeluaran Perkapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran per kapita jauh di bawah rumah tangga terkaya. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.	$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100\%$ <p> <math>Y^*</math> = Pengeluaran per kapita harga konstan  <math>Y</math> = Pengeluaran per kapita setahun            IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar         </p>	BPS	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2 Dinas Sosial 3 Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan 4 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM 5 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja 6 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab										
2	4	5	6	7	8										
<b>Sasaran 1.4 :</b>															
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi	Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ada tiga komponen penyusun IDG, yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	BPS	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB										
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-laki	BPS	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB										
<b>Tujuan 2 :</b>															
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dengan rumus :  $R = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100$ <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Dimana :</b></td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>: Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinyatakan Dalam Persen (%)</td> </tr> <tr> <td>PDRB</td> <td>: Produk Domestik Regional Bruto</td> </tr> <tr> <td>PDRB (t)</td> <td>: PDRB Pada Tahun (t)</td> </tr> <tr> <td>PDRB (t-1)</td> <td>: PDRB Pada Tahun (t-1)</td> </tr> </table>	<b>Dimana :</b>		R	: Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinyatakan Dalam Persen (%)	PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto	PDRB (t)	: PDRB Pada Tahun (t)	PDRB (t-1)	: PDRB Pada Tahun (t-1)	BPS	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Pertanian, Pangan & Perikanan 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM 3 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja 4 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan  <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH
	<b>Dimana :</b>														
R	: Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinyatakan Dalam Persen (%)														
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto														
PDRB (t)	: PDRB Pada Tahun (t)														
PDRB (t-1)	: PDRB Pada Tahun (t-1)														
2. Gini Ratio (Indeks Gini)	Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.	Gini Ratio dapat di hitung dengan rumus :  $Gini\ Ratio = \frac{k}{G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i+1})}$ <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Dimana :</b></td> </tr> <tr> <td>GR</td> <td>: Koefisien Gini (Gini Ratio)</td> </tr> <tr> <td>Pi</td> <td>: Frekuensi Penduduk Dalam Kelas Pengeluaran Ke-i</td> </tr> <tr> <td>Qi</td> <td>: Presentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas Ke-i</td> </tr> </table> <b>Nilai Gini Ratio Berkisar antara 0 dan 1 Jika :</b> G, 0,3 : Ketimpangan Rendah 0,3 < G < 0,5 : Sedang G > 0,5 : Tinggi	<b>Dimana :</b>		GR	: Koefisien Gini (Gini Ratio)	Pi	: Frekuensi Penduduk Dalam Kelas Pengeluaran Ke-i	Qi	: Presentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas Ke-i	BPS	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan 2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 3 Dinas Sosial 4 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja  <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup			
<b>Dimana :</b>															
GR	: Koefisien Gini (Gini Ratio)														
Pi	: Frekuensi Penduduk Dalam Kelas Pengeluaran Ke-i														
Qi	: Presentase Kumulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas Ke-i														



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
2	4	5	6	7	8
<b>Sasaran 2.1 :</b>					
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB adalah Perbandingan Jumlah Kontribusi dari Sektor Perdagangan dibagi dengan Total PDRB di kali 100 %	<p>% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dapat dihitung dengan rumus :</p> $\% \text{ Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100 \%$	BPS	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b></p> <p>1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</p> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <p>1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan</p> <p>2 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH</p>
<b>Sasaran 2.2 :</b>					
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB adalah Perbandingan Jumlah Kontribusi dari Sektor Pertanian dibagi dengan Total PDRB di kali 100 %	<p>% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dapat dihitung dengan rumus :</p> $\% \text{ Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100 \%$	BPS	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b></p> <p>1 Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan</p> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <p>1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan</p> <p>2 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH</p> <p>3 UPT. Balai Penyuluh Pertanian</p> <p>4 UPT. Puskesmas dan IB</p> <p>5 UPT. Balai Benih Ikan</p>
<b>Sasaran 2.3 :</b>					
Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata	1. Persentase Pertumbuhan spending of money	% Pertumbuhan Spending of Money adalah Total uang yang dibelanjakan Wistawan pada tahun berjalan (n) dikurangi dengan Total uang yang dibelanjakan Wisatawan pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi dengan total uang yang dibelanjakan Wisatawan pada tahun sebelumnya di kali 100 %	<p>% Pertumbuhan Spending Of Money dapat dihitung dengan rumus :</p> $\% \text{ Pertumbuhan Spending of Money} = \frac{\text{Total uang yang dibelanjakan Wistawan pada tahun berjalan (n) - Total uang yang dibelanjakan Wisatawan}}{\text{Total uang yang dibelanjakan Wisatawan pada tahun sebelumnya}} \times 100$	Rekapitulasi Data Spending of Money	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b></p> <p>1 Dinas Pariwisata &amp; Kebudayaan</p> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <p>1 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM</p> <p>2 UPTD. Pasar</p> <p>3 UPTD. Parkir</p> <p>4 dan OPD atau UPTD Lainnya Pemungut Retribusi</p>
<b>Sasaran 2.4 :</b>					
Meningkatnya iklim usaha dan investasi	1. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi	% Pertumbuhan Investasi adalah Total Investasi pada tahun berjalan (n) dikurangi dengan Total Investasi pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi dengan total Investasi pada tahun sebelumnya (n-1) di kali 100 %	<p>% Pertumbuhan Nilai Investasi dapat dihitung dengan rumus :</p> $\% \text{ Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Total Investasi pada tahun berjalan (n) dikurangi dengan Total Investasi pada tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{total Investasi pada tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100 \%$	Data Laporan Investasi	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b></p> <p>1 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja</p> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <p>1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan</p> <p>2 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup</p> <p>3 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan</p> <p>4 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</p> <p>5 Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan</p> <p>6 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p>7 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah</p>



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab										
2	4	5	6	7	8										
<b>Sasaran 2.5 :</b>															
Menurunnya angka kemiskinan	1. Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan adalah Persentase Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (GK)	<p>% Angka Kemiskinan dapat dihitung dengan rumus :</p> <p>Rumus :</p> $P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left( \frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha$ <p>Dimana :</p> <table border="1"> <tr> <td><math>\alpha</math></td> <td>: 0</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td>: Garis Kemiskinan</td> </tr> <tr> <td>Y<sub>i</sub></td> <td>: Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (i=1,2,3.....q), y<sub>i</sub> &lt; Z</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>: Banyak Penduduk Yang Berada Garis Kemiskinan</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>: Jumlah Penduduk</td> </tr> </table>	$\alpha$	: 0	Z	: Garis Kemiskinan	Y <sub>i</sub>	: Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (i=1,2,3.....q), y <sub>i</sub> < Z	Q	: Banyak Penduduk Yang Berada Garis Kemiskinan	n	: Jumlah Penduduk	BPS	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>2 Dinas Sosial</li> <li>3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</li> <li>4 Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan</li> <li>5 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup</li> <li>6 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja</li> </ol> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>2 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga</li> <li>3 Dinas Kesehatan</li> <li>4 Dinas Pemberdayaan Desa</li> </ol>
$\alpha$	: 0														
Z	: Garis Kemiskinan														
Y <sub>i</sub>	: Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (i=1,2,3.....q), y <sub>i</sub> < Z														
Q	: Banyak Penduduk Yang Berada Garis Kemiskinan														
n	: Jumlah Penduduk														
<b>Sasaran 2.6 :</b>															
Menurunnya angka pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan rumus :</p> <p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) = <math>\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100 \%</math></p>	BPS	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja</li> </ol> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</li> <li>2 Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan</li> <li>3 Dinas Sosial</li> </ol>										
<b>Sasaran 2.7 :</b>															
Meningkatnya kemandirian Desa	1. Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Desa Membangun (IDM) adalah : Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.	<p>Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:</p> $IDM = 1/3 ( IKS + IKE + IKL )$ <p>Dimana :</p> <table border="1"> <tr> <td>IDM</td> <td>: Indeks Desa Membangun</td> </tr> <tr> <td>IKS</td> <td>: Indeks Ketahanan Sosial</td> </tr> <tr> <td>IKE</td> <td>: Indeks Ketahanan Ekonomi</td> </tr> <tr> <td>IKL</td> <td>: Indeks Ketahanan Lingkungan</td> </tr> </table>	IDM	: Indeks Desa Membangun	IKS	: Indeks Ketahanan Sosial	IKE	: Indeks Ketahanan Ekonomi	IKL	: Indeks Ketahanan Lingkungan	Surat Keputusan dari Kemendes PDT dan Transmigrasi	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> </ol> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</li> <li>2 Dinas Kesehatan</li> <li>3 Dinas PUPR dan Pertanahan</li> <li>4 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup</li> <li>5 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</li> <li>6 Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan</li> <li>7 Dinas Sosial</li> <li>8 4 Kecamatan</li> <li>9 BAPPEDA</li> <li>10 BPKPD</li> </ol>		
IDM	: Indeks Desa Membangun														
IKS	: Indeks Ketahanan Sosial														
IKE	: Indeks Ketahanan Ekonomi														
IKL	: Indeks Ketahanan Lingkungan														



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab																																
2	4	5	6	7	8																																
<b>Tujuan 3 :</b>																																					
Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Indeks RB	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	<p>Hasil penilaian Indeks RB Oleh Kemenpan &amp; RB RI</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Sub-Komponen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Komponen Pengungkit</td> <td>60 %</td> <td>a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundangan-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan latalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Komponen Hasil</td> <td>40 %</td> <td>a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10 %)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total</b></td> <td><b>100 %</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	Komponen	Bobot	Sub-Komponen	1.	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundangan-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan latalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)	2.	Komponen Hasil	40 %	a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10 %)	<b>Total</b>		<b>100 %</b>		Surat Kemenpan RB RI tentang LHE RB	<p><b>OPD Penanggung Jawab :</b></p> <p>1 Sekretariat Daerah 2 Inspektorat</p> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <p>1 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 3 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM 4 Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja 5 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 6 Kecamatan Kota Pariaman</p>																
NO	Komponen	Bobot	Sub-Komponen																																		
1.	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundangan-undangan (5%) c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan latalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)																																		
2.	Komponen Hasil	40 %	a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10 %)																																		
<b>Total</b>		<b>100 %</b>																																			
<b>Sasaran 3.1 :</b>																																					
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi AKIP Kota	Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PANRB</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Predikat</th> <th>Nilai Absolut</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td><b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td><b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td><b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditanda dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td><b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terdapat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CC</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td><b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>&gt; 40 - 50</td> <td><b>Kurang</b> Sistem dan tata laksana dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td><b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tata laksana dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	1	AA	> 90 - 100	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.	2	A	> 80 - 90	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.	3	BB	> 70 - 80	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditanda dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator.	4	B	> 60 - 70	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terdapat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.	5	CC	> 50 - 60	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.	6	C	> 40 - 50	<b>Kurang</b> Sistem dan tata laksana dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.	7	D	> 0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tata laksana dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.	Hasil Evaluasi AKIP Kota oleh Kemenpan & RB	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b></p> <p>1 Sekretariat Daerah 2 Inspektorat 3 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <p>1 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 2 Semua OPD Lainnya</p>
NO	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi																																		
1	AA	> 90 - 100	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.																																		
2	A	> 80 - 90	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.																																		
3	BB	> 70 - 80	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditanda dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator.																																		
4	B	> 60 - 70	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terdapat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.																																		
5	CC	> 50 - 60	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.																																		
6	C	> 40 - 50	<b>Kurang</b> Sistem dan tata laksana dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.																																		
7	D	> 0 - 30	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tata laksana dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.																																		
	2. Opini BPK Terhadap LKPD	Opini BPK adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara, dan pemerintah daerah. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian BPK terhadap LKPD	<p><b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b></p> <p>1 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 2 Inspektorat</p> <p><b>OPD Pendukung :</b></p> <p>1 Sekretariat Daerah 2 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah</p>																																

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
2	4	5	6	7	8
<b>Sasaran 3.2 :</b>					
Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1. Indeks SPBE	Indeks SPBE adalah Indeks yang menggambarkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE	Nilai Indeks SPBE (n-1)	Hasil Penilaian dari Kemenpan RB	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Komunikasi Dan Informatika <b>OPD Pendukung :</b> 1 Inspektorat 2 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 3 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
	2. Indeks Profesional ASN	Indeks Profesional ASN adalah Indeks Profesional ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN dan/atau Indeks Profesionalitas ASN adalah Nilai yang digunakan untuk mengukur Tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	Indeks Profesional ASN dapat dihitung dengan rumus : $\text{Indeks Profesional ASN} = \sum_{i=1}^4 \text{IP } i$ <b>Keterangan :</b> IP1 : W1j * R1j IP1 : W2k * R2k IP1 : W3l * R3l IP1 : W4m * R4m IP : Indeks Profesionalisme IP1 : Indeks Profesionalisme ke-i IP1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin W1j * R1j : Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j W2k * R2k : Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k W3l * R3l : Bobot Indikator Kualifikasi ke-1 * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-1 W4m * R4m : Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m	Surat Keputusan BKN	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM <b>OPD Pendukung :</b> 1 Semua OPD
<b>Sasaran 3.3 :</b>					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks Pelayanan Publik adalah : indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Indeks Pelayanan Publik (n-1)	Hasil penilaian Kemenpan RB / Hasil Penilaian Ombudsman	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah <b>OPD Pendukung :</b> 1 OPD se Kota Pariaman




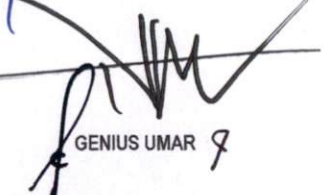
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab												
2	4	5	6	7	8												
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Nilai IKM oleh Lembaga Survey	Hasil penilaian oleh Lembaga Survey Independen	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah <b>OPD Pendukung :</b> 1 OPD se Kota Pariaman												
<b>Tujuan 4 :</b>																	
Terwujudnya Kota Pariaman layak huni	1. Indeks Kota Layak Huni ( Liveable City)	Kota Layak Huni (Liveable City) Kota menyediakan fasilitas dasar yang layak, agar menjadi tempat yang nyaman untuk bertempat tinggal. Fasilitas dasar tersebut menjadi kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kota dikatakan sebagai kota layak huni.  Faktor yang mempengaruhi Indeks Kota Layak Huni yaitu :  <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Faktor yang mempengaruhi Indeks Kota Layak Huni.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kualitas Infrastruktur</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kualitas Lingkungan Hidup</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tingkat Mitigasi Bencana</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Keterlambatan, Keterlambatan dan Keamanan Masyarakat</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Faktor yang mempengaruhi Indeks Kota Layak Huni.	1	Kualitas Infrastruktur	2	Kualitas Lingkungan Hidup	3	Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak	4	Tingkat Mitigasi Bencana	5	Keterlambatan, Keterlambatan dan Keamanan Masyarakat	Indeks Kota Layak Huni dapat dihitung dengan rumus :  $\text{Indeks Kota Layak Huni} = \frac{\% \text{Capaian Indeks Kualitas Infrastruktur} + \% \text{Capaian IKLH} + \% \text{Capaian \% Perumahan dan Permukiman Layak Huni} + \% \text{Capaian \% Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh} + \% \text{Capaian Indeks IRBI} + \%}{6}$	Data penghitungan Indeks Kota Layak Huni	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2 Dinas Perumahan, Perumahan Rakyat, Dan LH <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Perhubungan 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Satuan Pol PP 4 Kecamatan Kota Pariaman
NO	Faktor yang mempengaruhi Indeks Kota Layak Huni.																
1	Kualitas Infrastruktur																
2	Kualitas Lingkungan Hidup																
3	Kualitas Perumahan dan Permukiman yang Layak																
4	Tingkat Mitigasi Bencana																
5	Keterlambatan, Keterlambatan dan Keamanan Masyarakat																
<b>Sasaran 4.1 :</b>																	
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1. Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah adalah Sebuah indeks yang menggambarkan pencapaian kualitas infrastruktur yang terdiri dari 1) Infrastruktur jalan, 2) Infrastruktur drainase, 3) Infrastruktur irigasi, 4) Infrastruktur bangunan publik, dan 5) Infrastruktur PJU	Indeks infrastruktur daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :  $\text{Indeks Infrastruktur Daerah} = \frac{\% \text{Panjang Jalan Kota dengan kondisi mantap} + \% \text{Panjang drainase kota dalam kondisi baik} + \% \text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{3}$	1.) Database jalan 2.) database irigasi	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Perumahan, Perumahan Rakyat, Dan LH 2 Dinas Perhubungan												
<b>Sasaran 4.2 :</b>																	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.	Indeks Kualitas Lingkungan dapat dihitung dengan rumus :  $\text{IKL} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ Dikirim wa sama bu ade untuk keterangan	Dinas Perumahan, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan LH <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2 Dinas Kesehatan 3 Kecamatan Kota Pariaman 4 Desa dan Kelurahan Kota Pariaman												



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
2	4	5	6	7	8
<b>Sasaran 4.3 :</b>					
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	1. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	% Perumahan dan Permukiman Layak Huni adalah perbandingan perumahan dan permukiman yang sudah memenuhi kriteria perumahan dan permukiman layak huni	% Perumahan dan Permukiman Layak Huni dapat dihitung dengan rumus :  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">\frac{\% \text{ Sanitasi Layak Aman} + \% \text{ Air Minum Layak} + \% \text{ Rumah Layak}}{3}</math> </div>	Data hasil penghitungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2 Dinas Sosial 3 Kecamatan Kota Pariaman 4 Desa dan Kelurahan Kota Pariaman
	2. Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani adalah Luasan Kawasan kumuh dikurangi dengan luas kawasan kumuh yang ditangani	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani dapat dihitung dengan rumus :  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">\text{luas kawasan kumuh} - \text{luas kawasan kumuh yang ditangani}</math> </div>	Data hasil penghitungan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2 Dinas Sosial 3 Kecamatan Kota Pariaman 4 Desa dan Kelurahan Kota Pariaman
<b>Sasaran 4.4 :</b>					
Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1. Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana adalah : Sebuah Indeks yang menggambarkan tingkat resiko bencana sebuah daerah dengan melihat tiga komponen yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas.	Indeks Resiko Bencana dihitung berdasarkan rumus berikut :  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center;"> <math display="block">\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}</math> </div>	Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dari BNPB	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah <b>OPD Pendukung :</b> 1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 2 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga 3 Dinas Kesehatan 4 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 5 Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dan LH 6 DPMPSTSP & Naker 7 Kecamatan Kota Pariaman 8 Desa dan Kelurahan Kota Pariaman
<b>Sasaran 4.5 :</b>					
Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	1. Indeks Ketentraman dan ketertiban	Indeks Ketentraman dan ketertiban adalah sebuah indeks yang menggambarkan pencapaian dari tingkat ketentraman dan ketertiban	Indeks Ketentraman dan ketertiban dapat dihitung dengan rumus :  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <math display="block">\text{Indeks Ketentraman dan ketertiban} = 30\% \text{ (persentase penyelesaian pelanggaran K3)} + 30\% \text{ (persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat)} + 20\% \text{ (persentase peningkatan kapasitas Pol PP)} + 20\% \text{ (Desa/Kelurahan yang melaksanakan perlindungan masyarakat)}</math> </div>	Data Laporan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	<b>OPD Penanggung Jawab Utama :</b> 1 Dinas Satuan Pol PP 2 Kantor Kesbang pol <b>OPD Pendukung :</b> 1 Kecamatan se Kota Pariaman 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Desa dan Kelurahan Kota Pariaman



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	OPD Penanggung Jawab
2	4	5	6	7	8

  
 WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDako PARIAMAN	17/07-23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPELAYANAN RAKYAT	13/7-23
KEMAH/PTD M	13/7-23

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Lampiran II Peraturan Walikota Pariaman

Nomor :  
Tanggal :

34  
3 Juli

Tahun 2023  
2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga</b>						
1	Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 4-6 tahun), dan dinyatakan dalam persentase	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dapat dihitung dengan rumus : $\text{Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD} = \frac{\text{jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini}}{\text{Jumlah penduduk yang berumur umur 4-6 tahun}} \times 100 \%$	BPS dan Dikpora	1 Bidang PAUD dan PNF
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah perbandingan antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dapat dihitung dengan rumus : $\text{Angka Partisipasi Murni (APM) SD} = \frac{\text{Jumlah Murid SD/MI/Paket A Usia 7-12}}{\text{Jumlah penduduk Usia 7-12}} \times 100 \%$	BPS dan Dikpora	1 Bidang Pendidikan Dasar
		3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dapat dihitung dengan rumus : $\text{Angka Partisipasi Murni (APM) SMP} = \frac{\text{Jumlah Murid SMP/MTs/Paket B Usia 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100 \%$	BPS dan Dikpora	1 Bidang Pendidikan Dasar
2	Meningkatnya Kualitas Pendidik	1. % Guru sesuai kualifikasi S1 atau DIV	% Guru sesuai kualifikasi S1 atau DIV adalah perbandingan antara Guru Yang telah berkualifikasi S1 atau DIV dengan Total Guru dinyatakan dalam persentase	% Guru sesuai kualifikasi S1 atau D4 dapat dihitung dengan rumus : $\% \text{ Guru sesuai kualifikasi S1 atau DIV} = \frac{\text{Jumlah Guru Yang telah berkualifikasi S1 atau D4}}{\text{Jumlah Guru}} \times 100 \%$	Dikpora	1 Bidang Pendidikan Dasar
		2. % Guru yang memiliki sertifikat pendidik	% Guru yang memiliki sertifikat pendidik adalah perbandingan Guru Yang telah bersertifikat pendidik dengan Total Guru dinyatakan dalam persentase	% Guru yang memiliki sertifikat pendidik dapat dihitung dengan rumus :	Dikpora	1 Bidang Pendidikan Dasar



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
				$\% \text{ Guru yang memiliki sertifikat pendidik} = \frac{\text{Jumlah Guru Yang telah bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah Guru}} \times 100 \%$		
3	Meningkatnya Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan	1. Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD/ MI berdasarkan Rapor Pendidikan	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD/ MI berdasarkan Rapor Pendidikan adalah rata-rata kemampuan siswa SD/ MI dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu	Rapor pendidikan	Hasil rapor pendidikan dari aplikasi rapor pendidikan kemendikbudristek	1 Bidang Pendidikan Dasar
		2. Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP/ MTs berdasarkan Rapor Pendidikan	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP/ MTs berdasarkan Rapor Pendidikan adalah rata-rata kemampuan siswa SMP/ MTs dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu	Rapor pendidikan	Hasil rapor pendidikan dari aplikasi rapor pendidikan kemendikbudristek	1 Bidang Pendidikan Dasar
		3. Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD/ MI berdasarkan Rapor Pendidikan	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD/ MI berdasarkan Rapor Pendidikan adalah kemampuan siswa SD/ MI dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu	Rapor pendidikan	Hasil rapor pendidikan dari aplikasi rapor pendidikan kemendikbudristek	1 Bidang Pendidikan Dasar
		4. Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP/ MTs berdasarkan Rapor Pendidikan	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP/ MTs berdasarkan Rapor Pendidikan adalah kemampuan siswa SMP/ MTs dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu	Rapor pendidikan	Hasil rapor pendidikan dari aplikasi rapor pendidikan kemendikbudristek	1 Bidang Pendidikan Dasar
4	Meningkatnya Prestasi Pemuda	1. Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Provinsi	Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Provinsi adalah jumlah pemuda kota pariaman yang mendapatkan penghargaan/prestasi pada perlombaan tingkat provinsi dan nasional	Jumlah pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi	Dispora Provinsi Sumatera Barat	1 Bidang Pemuda dan Olahraga
5	Meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Provinsi adalah jumlah Atlet kota pariaman yang mendapatkan penghargaan pada kejuaraan tingkat provinsi dan nasional	Jumlah atlet yang berprestasi pada tingkat provinsi	Dikpora	1 Bidang Pemuda dan Olahraga

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dinas Kesehatan</b>						
1	Menurunnya Angka Morbiditas dan Mortalitas	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu adalah : Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	<p>Angka Kematian Ibu dapat dihitung dengan rumus :</p> $\text{AKI} = \frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, Bersalin dan Nifas disuatu wilayah tertentu selama 1}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	BPS dan Dinkes	1 Bidang Kesmas 2 Bidang Yankes 3 Bidang P2P
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi adalah Jumlah bayi usia dibawah 1 tahun yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	<p>Angka Kematian Bayi dapat dihitung dengan rumus :</p> $\text{AKB/IMR} = \frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) dalam kurun waktu tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup pada satu tahun tertentu}} \times 1000$	BPS dan Dinkes	1 Bidang Kesmas 2 Bidang Yankes 3 Bidang P2P
		3. Prevalensi Stunting	Persentase stunting adalah Jumlah balita pendek dan sangat pendek disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	<p>Persentase stunting pada balita dapat dihitung dengan rumus :</p> $\% \text{ Stunting} = \frac{\text{Jumlah balita pendek dan sangat pendek disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah seluruh balita di wilayah tertentu di kurun waktu yang sama selama 1 Tahun}} \times 100 \%$	1. Laporan Hasil Pendataan Pemantauan Status Gizi 2. e-PPGBM	1 Bidang Kesmas 2 Bidang P2P
<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan</b>						
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1. Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap adalah proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.	<p>Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap dapat dihitung dengan rumus:</p> $\frac{\text{Panjang jalan kota dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100 \%$	Database jalan	1 Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi
		2. Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik adalah jumlah panjang bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan yang dapat difungsikan secara optimal.	<p>Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik dapat dihitung dengan rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah panjang drainase primer dan sekunder yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah panjang total drainase primer dan sekunder kota}} \times 100 \%$	Database drainase	1 Bidang Pengairan



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7		
		3.	Persentase panjang jaringan irigasi kota dalam kondisi baik	Persentase panjang jaringan irigasi kota dalam kondisi baik adalah proporsi panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan panjang total jaringan irigasi kota	Persentase panjang jaringan irigasi kota dalam kondisi baik dapat dihitung dengan rumus:  $\frac{\text{Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang total jaringan irigasi kota}} \times 100\%$	Database irigasi	1	Bidang Pengairan
		4.	Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif	Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif adalah perbandingan jumlah bangunan gedung negara dalam kondisi baik dengan jumlah total bangunan gedung negara	Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif dapat dihitung dengan rumus:  $\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang representatif}}{\text{Jumlah bangunan gedung negara}} \times 100\%$	Data survey bidang	1	Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan
2	Meningkatnya kualitas permukiman yang layak huni	1.	Persentase perumahan dan Permukiman Layak Huni (% Perumahan Layak Huni)	Persentase Sanitasi Layak Aman adalah perbandingan jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi layak aman dengan jumlah rumah tangga yang dinyatakan dengan persentase	Persentase Sanitasi Layak Aman dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Jumlah RT berakses sanitasi layak aman}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$	Laporan SPM Bidang Sanitasi	1	Bidang Cipta Karya
		2.	Persentase Air Minum Layak	Persentase Air Minum Layak adalah perbandingan jumlah rumah tangga yang berakses air minum layak dengan jumlah rumah tangga yang dinyatakan dengan persentase	Persentase Air Minum Layak dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Jumlah RT berakses air minum layak}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$	Laporan SPM Bidang Air Minum	1	Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana penataan ruang	1. Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang adalah Pemanfaatan ruang yang mengikuti aturan yang telah diatur pada dokumen rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai}}{\text{Luas Rencana Pemanfaatan Ruang}} \times 100\%$	Dokumen KRK dan Site Plan	1	Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan	
<b>Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup</b>								
1	Meningkatnya Perumahan Layak Huni dan Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	1.	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni (% Perumahan Layak Huni)	Persentase Rumah Layak Huni adalah Total Rumah yang ada dikurangi dengan total RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang tersisa pada tahun N dibagi dengan total rumah yang ada	Persentase Rumah Layak Huni dapat dihitung dengan rumus:		1	
		2.	Jumlah Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang tertangani adalah Luasan Kawah Kumuh dikurangi dengan Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Luasan kawasan permukiman Kumuh yang tertangani dapat dihitung dengan rumus: =Luas Kawasan Kumuh - Luas kawasan kumuh yang ditangani		1	



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dihitung dengan rumus :</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dihitung dengan rumus :</p> $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ <p>Keterangan :</p> <p><b>IKU</b> = Indeks Kualitas Udara = <math>100 - (50 \cdot 0.9 \times (IEU - 0.1))</math></p> <p><b>IKA</b> = Indeks Kualitas Air = Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen</p> <p><b>IKL</b> = Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan = <math>100 - \{ (84.5 - ((LTL/LW - DKK) \times 100) / (50/41.2)) \}</math></p>	Surat Kementerian Lingkungan Hidup	1 Bidang P2KLH
<b>Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran</b>						
1	Meningkatnya pencapaian Penegakan PERDA/PERKADA	1. Persentase pencapaian Penegakan PERDA/PERKADA	Persentase pencapaian penegakan perda/perkada adalah tingkat penyelesaian ketertiban, ketentraman dan keindahan dalam suatu kawasan daerah yang dinyatakan dalam persentase	<p>Persentase pencapaian Penegakan Perda/Perkada dapat dihitung dengan rumus :</p> $\text{persentase pencapaian Penegakan PERDA/PERKADA} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi}} \times 100\%$	Data laporan monev pelanggaran terhadap PERDA/PERKADA an oleh masyarakat	1 Bidang PPUD dan Peningkatan SDM 2 Bidang Trantibum, Damkar dan Linmas
2	Meningkatnya Pengendalian Bencana Kebakaran	1. Persentase Bencana Kebakaran yang Tertangani	Persentase Bencana Kebakaran yang tertangani adalah perbandingan antara jumlah kejadian kebakaran yang ditangani terhadap jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di kawasan perkotaan, dalam satuan persen.	$\text{Persentase Bencana Kebakaran yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah Bencana kebakaran yang tertangani}}{\text{Jumlah Bencana kebakaran yang terjadi}} \times 100\%$	Data laporan kebakaran pertahun	1 Bidang PPUD dan Peningkatan SDM 2 Bidang Trantibum, Damkar dan Linmas
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>						
1	Meningkatnya Ketahanan daerah dalam menghadapi Bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik ditingkat kabupaten, Kota maupun provinsi	<p>Indek Ketahanan Daerah dapat dihitung dengan rumus :</p> $IKD = \frac{\text{Jumlah Indikator yang telah dilaksanakan}}{71 \text{ Indikator yang tersedia}} \times 100\%$	Aplikasi Inarisk atau surat Keputusan hasil Nilai IKD dari BNPB	1 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2 Bidang Kedaruratan dan Logistik 3 Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dinas Sosial</b>						
1	Meningkatnya pemenuhan hak dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase Masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar esensial	Perbandingan antara masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan pemenuhan dasar esensial dengan jumlah keseluruhan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar esensial}}{\text{Jumlah keseluruhan masyarakat miskin}} \times 100\%$	Laporan Penyaluran bantuan sosial	1 Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir 2 Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial
		2. Persentase Cakupan layanan PPKS	Perbandingan antara PPKS anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, gepeng dan korban bencana yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dengan jumlah PPKS dimaksud	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan terhadap PPKS}}{\text{Jumlah keseluruhan PPKS}} \times 100\%$	Laporan SPM bidang sosial	1 Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin 2 Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan Sosial
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB</b>						
1	Meningkatnya Kestaraan dan Keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki laki dan perempuan dalam parlemen	Indeks Pemberdayaan gender(IDG) dapat dihitung dengan cara :  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Hasil Evaluasi Kemen PP         </div>	SK Kemen PP dan PA	1 Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	1. Starata Kota Layak Anak (KLA)	Starata Kota Layak Anak adalah suatu gagasan yang menunjukan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas yang memberi kesempatan pada anak dan memiliki fasilitas pendidikan	Starata Kota Layak Anak dapat ditung dengan cara :  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Hasil Evaluasi Kemen PP         </div>	SK Kemen PP dan PA	1 Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun adalah Jumlah Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia subur aktif}}{\text{Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	BKKBN	1 Bidang Keluarga Berencana

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		2. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi	Cakupan PUS yang ingin ber kb tidak terpenuhi dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Tidak ingin anak lagi} + \text{ingin anak ditunda}}{\text{Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	BKKBN	1 Bidang Keluarga Berencana
<b>Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>						
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya.	$\frac{\% \text{ Capaian Perekam KTP el} + \% \text{ Capaian Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)} + \% \text{ Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)}}{3}$	Data hasil olahan bidang PIAK	1 Bidang administrasi kependudukan 2 Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dihitung dengan cara :  Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan masyarakat	1 Bidang administrasi kependudukan 2 Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>						
1	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	1. Persentase desa mandiri	<b>Persentase desa mandiri</b> adalah jumlah desa mandiri dibagi jumlah desa x 100 %.  <b>Desa mandiri</b> adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan	Persentase Desa Mandiri dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Jumlah desa mandiri}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Surat Keputusan Kementerian desa, PDT dan transmigrasi	1 Bidang Pemerintahan desa 2 Bidang Pemberdayaan masyarakat
		2. Persentase desa maju	<b>Persentase desa maju</b> adalah Jumlah Desa maju dibagi jumlah desa x 100 %.  <b>Desa Maju</b> adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan	Persentase Desa Maju dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Surat Keputusan Kementerian desa, PDT dan transmigrasi	1 Bidang Pemerintahan desa 2 Bidang Pemberdayaan masyarakat



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		3. Persentase desa berkembang	<p>Persentase Desa Berkembang adalah desa berkembang dibagi dengan jumlah desa x 100 %</p> <p>Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya</p>	<p>Persentase Desa Berkembang dapat dihitung dengan rumus :</p> $\% \text{ Desa Berkembang} = \frac{\text{Jumlah desa Berkembang}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	Surat Keputusan Kementerian desa, PDT dan transmigrasi	1 Bidang Pemberdayaan masyarakat 2 Bidang Pemerintahan desa
<b>Dinas Perhubungan</b>						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Berlalu Lintas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat bidang perhubungan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Data Hasil Survey	1 Sekretariat 2 Bidang Teknik Sarana Keselamatan Angkutan Darat 3 Bidang Angkutan 4 UPT Parkir
		2. Persentase Cakupan Layanan Berlalu Lintas	Cakupan Layanan Berlalu Lintas adalah Cakupan Layanan Minimal Dishub yang ada dan diberikan kepada masyarakat	<p>Persentase Cakupan Layanan Dishub dapat dihitung dengan rumus :</p> $\% \text{ Cakupan Layanan Berlalu Lintas} = \frac{\text{Jumlah Layanan perhubungan yang}}{\text{Jumlah Target Layanan perhubungan yang ditetapkan}} \times 100 \%$	Laporan Tahunan Perhubungan	1 Bidang Teknik Sarana Keselamatan Angkutan Darat 2 Bidang Angkutan
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>						
1	Meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pariaman	Penilaian Tingkat Kematangan (Maturity Level) terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintahan Daerah Kota Pariaman sehingga menghasilkan nilai indeks SPBE	Hasil Penilaian Indeks SPBE oleh MenPAN RB	Surat keputusan Kemenpan RB	1 Bidang E-Government dan Bidang Statistik dan Persandian
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah Penilaian terhadap komitmen dan konsistensi badan publik atau Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik T	Komisi Informasi Sumbar	1 Bidang IKP dan Bidang Statistik dan Persandian
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	1. Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik adalah ukuran capaian penyelenggaraan satu data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain IPS juga dijadikan dasar melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI	Hasil Penilaian Indeks Pembangunan Statistisi oleh BPS (Badan Pusat Statistik)	Badan Pusat Statistik (BPS)	1 Bidang Statistik dan Persandian



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>						
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, industri, koperasi dan umkm	1. Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan adalah meningkatnya jumlah pedagang dengan rumus perhitungan jumlah pedagang Kota Pariaman tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah pedagang Kota Pariaman tahun n-1 dibagi 100 persen	$\frac{\text{Jumlah pedagang tahun n} - \text{jumlah pedagang tahun n-1}}{\text{Jumlah pedagang tahun n-1}} \times 100\%$	Data Base sektor Perdagangan	1 Bidang Perdagangan
		2. Persentase pertumbuhan sektor industri	Pertumbuhan sektor industri adalah meningkatnya jumlah industri dengan rumus perhitungan jumlah industri Kota Pariaman tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah industri Kota Pariaman tahun n-1 dibagi 100 persen	$\frac{\text{Jumlah industri tahun n} - \text{jumlah perindustrian tahun n-1}}{\text{Jumlah industri tahun n-1}} \times 100\%$	Data base sektor perindustrian	1 Bidang Perindustrian
		3. Persentase peningkatan kualitas koperasi	Persentase peningkatan kualitas koperasi adalah meningkatnya modal dan aset koperasi dengan perhitungan modal dan aset koperasi tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi modal dan aset koperasi tahun n-1 dibagi 100 persen	$\frac{\text{Modal dan aset koperasi tahun n} - \text{Modal dan aset koperasi tahun n-1}}{\text{Modal dan aset koperasi tahun n-1}} \times 100\%$	Data base koperasi (buku koperasi)	1 Bidang Koperasi dan UMKM
		4. Persentase peningkatan kualitas UMKM	Persentase peningkatan kualitas UMKM adalah meningkatnya skala usaha UMKM dengan perhitungan aset dan omset UMKM tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi aset dan omset UMKM tahun n-1 dibagi 100 persen	$\frac{\text{Aset dan omset UMKM tahun n} - \text{Aset dan omset UMKM tahun n-1}}{\text{Aset dan omset UMKM tahun n-1}} \times 100\%$	Data base sektor UMKM	1 Bidang Koperasi dan UMKM
<b>Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja</b>						
1	Meningkatnya Nilai Investasi	1. Jumlah realisasi investasi PMA & PMDN	Jumlah realisasi investasi PMA & PMDN adalah Jumlah nominal realisasi investasi PMA & PMDN yang terinput kedalam aplikasi OSS (LKPM secara online)	Laporan LKPM tahun berjalan	LKPM Online	1 Bidang Penanaman Modal & PTSP
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja adalah Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja dapat dihitung dengan rumus :  $\% \text{ Capaian realisasi investasi PMA \& PMDN} = \frac{\text{Jumlah yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	BPS	1 Bidang Tenaga Kerja
<b>Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan</b>						
1	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan	1. % Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun berkenaan dengan Jumlah wisatawan tahun (n) 1 dikurangi dengan Kunjungan Wisatawan (n-1) selanjutnya dibagi dengan jumlah kunjungan tahun sebelumnya sesudah itu dikali 100%	% Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan dapat dihitung dengan rumus :  $\% \text{ Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan} = \frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan (n)} - \text{Jumlah Kunjungan Wisatawan (n-1)}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan (n-1)}} \times 100\%$	Data Olahan Hasil Kunjungan	1 Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan	1. Length of Stay (Rata-rata Lama Tinggal)	Definisi Lama Tinggal adalah Lamanya Wisatawan mengunjungi suatu daerah atau Negara dalam satu kali kunjungan	Hasil Survey	Data Hasil Survey	1 Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi
<b>Dinas Perpustakaan dan Arsip</b>						
2	Meningkatnya Budaya Baca masyarakat	1. Tingkat Kegemaran membaca	Tingkat Kegemaran membaca adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.	Hasil Penilaian Survey oleh lembaga independen	Data Hasil Survey	1 Bidang Perpustakaan
2	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah	2. Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) merupakan jumlah OPD yang telah mengelola arsip sesuai NSPK dibagi dengan jumlah OPD yang ada dikali 100 %	$\text{Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK} = \frac{\text{Jumlah OPD yang telah mengelola arsip sesuai NSPK}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Laporan audit kearsipan internal	1 Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
<b>Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan</b>						
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Indeks ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan suatu wilayah	Indeks ketahanan pangan dapat dihitung dengan rumus : $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Dimana: $i$ : Indikator ke-1, 2, 3, ..., 7, 8, dan 9 $j$ : Kabupaten ke-1, 2, 3, ..., 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ..., 96, 97, dan 98 $Y_j$ : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j $a_i$ : Bobot masing-masing indikator ke-i $X_{ij}$ : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j	Surat keputusan Badan Pangan Nasional	1 Bidang Ketahanan pangan
2	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	2. Persentase capaian produksi sektor pertanian	Persentase capaian produksi sektor pertanian adalah perbandingan antara capaian produksi sektor pertanian dengan target yang dinyatakan dalam persentase	Persentase capaian produksi sektor pertanian dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase capaian produksi sektor pertanian} = \frac{\text{Jumlah Produksi Pertanian}}{\text{Target Produksi Pertanian}} \times 100\%$	Data laporan produksi	1 Bidang tanaman pangan dan hortikultura 2 Bidang peternakan dan kesehatan hewan 3 Bidang perikanan dan kelautan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sekretariat Daerah</b>						
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima	1. Capaian Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	Perbandingan nilai yang diperoleh dari penilaian SAKIP dari Komponen Pelaporan dengan nilai bobot komponen pelaporan yang di Keluarkan Oleh Kemenpan RB	$\frac{\text{Nilai yang diperoleh dari penilaian SAKIP dari Komponen Pelaporan}}{\text{Nilai Bobot Komponen Pelaporan SAKIP}}$	LHE Kemenpan RB	1 Bagian Organisasi
		2. Nilai EPPD	Nilai EPPD adalah Penilaian atas proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri	LHE Kemendagri	1 Bagian Pemerintahan
		3. Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Perbandingan Nilai Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang Diperoleh dengan nilai Bobot yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Nilai Penerapan Standar Pelayanan Minimal}}{\text{Nilai Bobot SPM yang telah di Tetapkan}} \times 100\%$	Dokumen Laporan SPM	1 Bagian Pemerintahan
		4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SETDA)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SETDA) adalah Nilai Pengukuran Kinerja atas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman berdasarkan 6 Aspek: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi Pelayanan.	Nilai IKM Hasil Survey dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\sum \text{Skor IKM yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Jenis IKM yang Dilaksanakan}}$	Data hasil survey	1 Bagian Organisasi 2 Bagian Umum 3 Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 4 Bagian Administrasi Pembangunan 5 Bagian Hukum 6 Bagian Pemerintahan
<b>Sekretariat DPRD</b>						
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Peran DPRD sesuai dengan Fungsinya	1. Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan DPRD merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan tingkat kepuasan layanan sekretariat DPRD Terhadap DPRD	Nilai IKM layanan Sekretariat DPRD Nilai IKM Hasil Survey dapat dihitung dengan rumus : $\frac{\sum \text{Skor IKM yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Jenis IKM yang Dilaksanakan}}$	Data hasil survey	1 Bagian Umum dan Keuangan 2 Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran 3 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
<b>Inspektorat</b>						
1	Meningkatnya tatakelola pengawasan pemerintah kota pariaman	1. Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP adalah Nilai yang menggambarkan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.	Hasil penilaian Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP dikeluarkan BPKP	1 Irban I, II, III dan IV



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		2. Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP adalah Nilai yang menggambarkan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan	Hasil penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	Hasil Penilaian maturitas SPIP oleh BPKP	1 Irban I, II, dan III
		3. Nilai Sakip Kota Komponen Evaluasi	Nilai Sakip Komponen Evaluasi adalah salah satu komponen sakip yang merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh APIP dan evaluasi internal oleh masing-masing Perangkat Daerah baik secara periode (Triwulan, Semesteran dan Tahunan)	Hasil evaluasi SAKIP kota oleh Kemenpan	Hasil Evaluasi SAKIP Kota oleh Kemenpan	1 Irban I, II dan III
		4. Persentase tindak lanjut temuan	Persentase tindak lanjut temuan adalah Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun n dengan jumlah seluruh temuan pada tahun n, yang dinyatakan dalam persentase	LHP Inspektorat dan LHP BPK	LHP Inspektorat/BPK dan Dokumen Laporan	4 Irban I, II, III dan IV

**Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah	1. Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja adalah salah satu komponen sakip yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PANRB dari komponen perencanaan kinerja</p> <p>LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-komponen 1 Keterkaitan</th> <th>Sub-komponen 2 Kualitas</th> <th>Sub-komponen 3 Pemerataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akumulatif Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>10,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akumulatif Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-komponen			Total Bobot	Sub-komponen 1 Keterkaitan	Sub-komponen 2 Kualitas	Sub-komponen 3 Pemerataan	Perencanaan Kinerja	5	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akumulatif Kinerja Internal	5	7,5	10,5	25	Nilai Akumulatif Kinerja	20	30	50	100	Hasil Evaluasi AKIP Kota oleh Kemenpan & RB	1 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 3 Bidang Ekonomi 4 Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Komponen	Sub-komponen			Total Bobot																																	
Sub-komponen 1 Keterkaitan	Sub-komponen 2 Kualitas		Sub-komponen 3 Pemerataan																																				
Perencanaan Kinerja	5	9	15	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akumulatif Kinerja Internal	5	7,5	10,5	25																																			
Nilai Akumulatif Kinerja	20	30	50	100																																			
		2. Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja adalah salah satu komponen sakip yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.	<p>Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PANRB dari komponen pengukuran kinerja</p> <p>LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-komponen 1 Keterkaitan</th> <th>Sub-komponen 2 Kualitas</th> <th>Sub-komponen 3 Pemerataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akumulatif Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>10,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akumulatif Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-komponen			Total Bobot	Sub-komponen 1 Keterkaitan	Sub-komponen 2 Kualitas	Sub-komponen 3 Pemerataan	Perencanaan Kinerja	5	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akumulatif Kinerja Internal	5	7,5	10,5	25	Nilai Akumulatif Kinerja	20	30	50	100	Hasil Evaluasi AKIP Kota oleh Kemenpan & RB	1 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 3 Bidang Ekonomi 4 Bidang Penelitian Pengembangan dan Evlpa
Komponen	Sub-komponen			Total Bobot																																			
	Sub-komponen 1 Keterkaitan	Sub-komponen 2 Kualitas	Sub-komponen 3 Pemerataan																																				
Perencanaan Kinerja	5	9	15	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akumulatif Kinerja Internal	5	7,5	10,5	25																																			
Nilai Akumulatif Kinerja	20	30	50	100																																			

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
		3. Persentase Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPD) yang Tercapai sesuai target	Persentase Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPD) yang tercapai Target adalah Perbandingan Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPD) yang tercapai sesuai target dibandingkan dengan Jumlah Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPD), yang dinyatakan dalam persentase	Persentase Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPD) yang Tercapai sesuai target dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPD) yang tercapai sesuai target}}{\text{Jumlah Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPD)}}$	Data Evaluasi RKPD dan Evaluasi RPD	1 Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 3 Bidang Ekonomi 4 Bidang Penelitian Pengembangan dan Evlap
		4. Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan adalah perbandingan Jumlah dokumen penelitian daerah dalam yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan dengan Jumlah seluruh dokumen perencanaan pembangunan, yang dinyatakan dalam persentase	Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dihitung dengan rumus :  $\frac{\text{Jumlah dokumen penelitian daerah dalam yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan}}{\text{Jumlah seluruh dokumen perencanaan pembangunan}} \times 100\%$	Data Laporan Bidang Perencanaan Bappeda	1 Bidang Penelitian Pengembangan dan Evlap
<b>Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah</b>						
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Opini BPK atas LKPD Kota Pariaman tahun n-1	Opini BPK adalah opini audit dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara, dan pemerintah daerah. Opini tertinggi (WTP) diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian BPK terhadap LKPD	1 Bidang Akuntansi
						2 Bidang Perbendaharaan
						3 Bidang Penganggaran
						4 Bidang Aset
2	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	1. Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah Besaran jumlah PAD dibagi dengan Besaran Jumlah Pendapatan Daerah di kali 100 %	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan rumus :	LKPD Kota Pariaman dan LRA APBD	1 Bidang Pendapatan
			Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi	$\frac{\text{Total Realisasi PAD (n-1)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan (n-1)}} \times 100\%$		

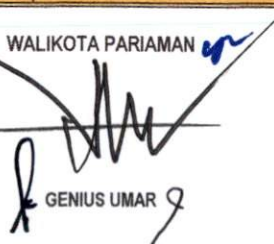


NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
<b>Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM</b>						
1	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	1. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN adalah Nilai yang digunakan untuk mengukur Tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	<p>Indeks Profesionalitas ASN dapat dihitung dengan rumus :</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">IP_1 = W_{1j} * R_{1j}</math> <math display="block">IP_2 = W_{2k} * R_{2k}</math> <math display="block">IP_3 = W_{3l} * R_{3l}</math> <math display="block">IP_4 = W_{4m} * R_{4m}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Keterangan:  IP = Indeks Profesionalisme  IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i  IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi  IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi  IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja  IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W<sub>1j</sub> * R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j  W<sub>2k</sub> * R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k  W<sub>3l</sub> * R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l  W<sub>4m</sub> * R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p> </div> </div>	Surat Keputusan BKN	1 Bidang Mutasi dan Informasi 2 Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	1. Indeks Penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah dan/atau Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Indeks penerapan sistem merit = (10%*jumlah nilai dari aspek <b>perencanaan kebutuhan</b>) + (20%*jumlah nilai dari aspek <b>pengadaan pegawai</b>) + (30%*jumlah nilai dari aspek <b>pengembangan karier</b>) + (10%*jumlah nilai dari aspek <b>manajemen kinerja</b>) + (10%*jumlah nilai dari aspek <b>penggajian dan penghargaan</b>) + (4%*jumlah nilai dari aspek <b>perlindungan dan pelayanan</b>) + (6%*jumlah nilai dari aspek <b>sistem informasi</b>)</p> </div>	Aplikasi SIPINTER Komisi ASN (KASN)	1 Bidang Mutasi dan Informasi 2 Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh BKPSDM	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <math display="block">\text{Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}</math> </div>	Hasil Survey IKM	1 Bidang Mutasi dan Informasi 2 Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur 3 Sekretariat
<b>Kecamatan Pariaman Utara</b>						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.	Hasil Survey IKM	Data Hasil Survey	1 Seksi Pemerintahan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah Jumlah Kewenangan Yang Dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kewenangan Yang Dilimpahkan	<p>% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dihitung dengan rumus :</p> $\text{\% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan} = \frac{\text{Jumlah kewenangan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kewenangan yang dilimpahkan}} \times 100 \%$	Data hasil laporan penyelenggaraan Pemerintahan	1 Seksi Pemerintahan 2 Seksi Kesejahteraan sosial 3 Seksi ketenteraman dan ketertiban 4 Seksi pemberdayaan masyarakat
<b>Kecamatan Pariaman Tengah</b>						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.	Hasil Survey IKM	Data Hasil Survey	1 Seksi Pemerintahan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah Jumlah Kewenangan Yang Dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kewenangan Yang Dilimpahkan	<p>% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dihitung dengan rumus :</p> $\text{\% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah kewenangan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kewenangan yang dilimpahkan}} \times 100 \%$	Data hasil laporan penyelenggaraan Pemerintahan	1 Seksi Pemerintahan 2 Seksi Kesejahteraan sosial 3 Seksi ketenteraman dan ketertiban 4 Seksi pemberdayaan masyarakat
<b>Kecamatan Pariaman Selatan</b>						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.	Hasil Survey IKM	Data Hasil Survey	1 Seksi Pemerintahan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah Jumlah Kewenangan Yang Dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kewenangan Yang Dilimpahkan	<p>% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dihitung dengan rumus :</p>	Data hasil laporan penyelenggaraan Pemerintahan	1 Seksi Pemerintahan



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
				$\% \text{ capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah kewenangan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kewenangan yang dilimpahkan}} \times 100 \%$		2 Seksi Kesejahteraan sosial 3 Seksi ketenteraman dan ketertiban 4 Seksi pemberdayaan masyarakat
<b>Kecamatan Pariaman Timur</b>						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.	Hasil Survey IKM	Data Hasil Survey	1 Seksi Pemerintahan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah Jumlah Kewenangan Yang Dilaksanakan Dibagi dengan Jumlah Kewenangan yang dilaporkan	$\% \text{ capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan} = \frac{\text{Jumlah kewenangan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kewenangan yang dilimpahkan}} \times 100 \%$	Data hasil laporan penyelenggaraan Pemerintahan	1 Seksi Pemerintahan 2 Seksi Kesejahteraan sosial 3 Seksi ketenteraman dan ketertiban 4 Seksi pemberdayaan masyarakat
<b>Kesbangpol</b>						
1	Meningkatnya pendeteksian dini potensi konflik	1. Potensi Konflik yang dicegah di Kota Pariaman	Potensi Konflik yang dicegah di Kota Pariaman adalah potensi potensi yang nantinya dapat menjadi konflik sehingga dapat mengakibatkan ancaman bagi stabilitas keamanan kota pariaman	$\frac{\text{potensi konflik yang teratasi}}{\text{jumlah potensi konflik}} \times 100 \%$	Laporan TIMDU PKS	1 Seksi Hubungan Antar Lembaga 2 Seksi Kesatuan Bangsa
2	Meningkatnya Indeks Demokrasi Kota Pariaman	1. Indeks Demokrasi Kota Pariaman	Indeks Demokrasi adalah perbandingan jumlah pengguna hak suara/pilih dengan jumlah pemilih di kota pariaman	Hasil Survey	Data hasil laporan Bawaslu dan KPU	1 Seksi organisasi politik dan kemasyarakatan

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN  
 UNIT PELAKSANA KEMENTERIAN  
 SEKSI KEMENTERIAN  
 ASISTEN PEMERINTAHAN  
 DAN KELEMBAGAAN BAWASLU  
 PARAF / TGL  
 4/4/23  
 20323  
 13/7/23  
 23/7-23